**PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER PADA KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Nuraini1 , H. Marsuq2 , Jamil Bazarah3**

1Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,Indonesia

2Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75234,Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui perencanaan pembangunan responsif gender pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan dengan tipe penelitian studi kasus penelitian ini melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan responsif gender telah dijalankan dengan baik hal ini ditandai pada aspek penyusunan rencana menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan yang responsif gender mengacu pada pedoman rencana pembangunan jangka panjang dan menengah secara nasional dan juga renstra Kabupaten. Penetapan Rencana menunjukkan bahwa penetapan rencana dibarengi dengan penetapan Pokja (Kelompok Kerja) dengan melakukan koordinasi dengan Ibu Bupati sebagai ketua Pokja (Kelompok Kerja) kabupaten dan Ibu Wakil Bupati Kutai Barat sebagai Wakil. Penetapan rencana dispesifikkan pada pemberian pelatihan terpadu kepada seluruh PNS dan TKK yang ada guna peningkatan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini merupakan bentuk kongkrit kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat dalam kaitan perencanaan responsif gender. Pada aspek pengendalian pelaksanaan rencana menunjukkan bahwa pengendalian dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dan koordinasi di bawah Kelompok Kerja Darma wanita Kabupaten Kutai Barat yang mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan kerja dan seminar pemberdayaan perempuan. Pada aspek evaluasi pelaksanaan rencana menunjukkan salah satu upaya evaluasi dilakukan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat yaitu dengan membuat jadwal untuk pemakaian pakaian daerah hari kamis dan wajib hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan program PUG. Direkomendasikan untuk Pokja memberikan masukan teknis yang tidak terlalu normatif dalam mendorong pembangunan responsif gender pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Responsif Gender.

**BAB I. PENDAHULUAN**

**1.1.** **Latar Belakang**

Gender merupakan kata yang populer mengacu pada makna sosial, budaya, dan biologis. Peran gender bisa berubah karena dipengaruhi oleh ideologi, ekonomi, adat, agama, dan sosial budaya, etnik, waktu, tempat, dan kemajuan iptek (Putraningsih, 2006). Konsep mengenai peran gender yang terstruktur di Indonesia dihubungkan dengan istilah pengarusutamaan gender sendiri merupakan adaptasi dari bahasa Inggris gender mainstraiming, dan dalam realitasnya terdapat kesalahpahaman serta konflik saat menjelaskan masalah bias gender atau stereotip peran gender. Ketidaksetaraan gender dan peran tradisional masing-masing gender telah benar-benar mengakar dalam pemikiran masyarakat Indonesia, dan budaya serta agama merupakan hambatan terbesar (Hermina, 2015).

Fenomena kesenjangan ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya suatu kondisi yang sama, seimbang antara perempuan dan lakilaki dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Melalui pemahaman bahwa tanggung jawab, peran, fungsi, kesempatan, peluang dalam kehidupan sosial merupakan tanggung jawab bersama baik laik-laki maupun perempuan serta mempunyai andil yang seimbang terhadap pembangunan di berbagai bidang sektor diharapkan mampu meminalisasikan permasalahan yang dihadapi di berbagai sektor kehidupan (Marince, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang ini maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul “Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat”

**1.2.** **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perencanaan pembangunan responsif gender pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat ?

**1.3.** **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui perencanaan pembangunan responsif gender pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.

**1.4.** **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

kontribusi yang positif bagi lembaga-lembaga yang membuat program, khususnya berkaitan perencanaan pembangunan responsif gender.

1. Kegunaan Akademik, diharapkan penelitian ini, menjadi salah satu referensi akademis dalam bidang administrasi publik dan menjadi informasi awal bagi peneliti lainnya yang mengkaji konsep perencaan dan gender.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

3.1. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.

3.2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:6).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:1). Penelitian ini berpusat pada segala hal terkait Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.

3.3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek

dari mana data diperoleh secara purposive. Adapun subyek penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Kator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kutai Barat

3. Kepala Sub Bagian Program, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.

4. Pegawai/Staf, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat 2 Orang Laki-laki dan 2 Orang Wanita.

3.4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-

hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban atau informasi dari informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian dilakukan dalam rangka melihat aktivitas di Lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara

mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Kabupaten Kutai Barat dan terkait Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.

4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Kutai Barat secara geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 115o25’54’’ sampai dengan 116 o32’43’’ Bujur Timur serta diantara 1 o31’05’’ Lintang Utara dan 1 o09’33’’ Lintang Selatan. Kabupaten terbagi menjadi 16 kecamatan dan 194 kampung. Kekenam belas kecamatan tersebut adalah kecamatan bongan, kecamatan jempang, kecamatan penyinggahan, kecamatan muara pahu, kecamatan muara lawa, kecamatan damai, kecamatan barong tongkok, kecamatan melak, kecamatan long iram, kecamatan bentian besar, kecamatan linggang bigung, kecamatan nyuatan, kecamatan siluq ngurai, kecamatan manor bulatan, kecamatan sekolaq darat dan kecamatan tering.

Daerah kabupaten kutai barat didominasi topografi bergelombang, dari kemiringan

landai sampai curam dengan ketinggian berkisar antara 0 – 1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0 – 60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai dikawasan danau dan kawasan danau dan

kawasan sepanjang sungai (DAS). Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 30 persen terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

**4.2. Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perencanaan pembangunan responsif Gender Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat maka penelitian ini difokuskan pada Perencanaan Pembangunan Responsif Gender yang terdiri dari indikator penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Untuk lebih jelasnya mengenai uraian indikator tersebut maka dapat disajikan sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana

Untuk mengetahui proses penyusunan rencana dalam Perencanaan

Pembangunan Responsif Gender maka dilakukan wawancara dengan informanKepala Sub Bagian Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai

Barat yang mengemukakan bahwa:

“Penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan Responsif Gender melibatkan semua unit kerja/sub bagian pada kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kutai Barat dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah secara nasional maupun daerah Kabupaten tahun anggaran 2005 sampai dengan Tahun anggaran 2025”

(Hasil wawancara tanggal 5 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam

penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan yang responsifgender

mengacu pada pedoman rencana pembangunan jangka panjang dan menengah

secara nasional dan juga renstra Kabupaten.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Staf Perempuan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat yang mengemukakan bahwa:

“Kesbangpol terlibat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran lebih menitikberatkan pada bagaimana strategi didaerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam setiap tahapan pembangunan di daerah. Paling tidak nantinya bisa diakomodir bagaimana proses perencanaan termasuk penganggaran yang perspektif gender, sebab mengutamakan pengarusutamaan gender akan dilaksanakan secara terencana melalui rencana aksi daerah” (Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perencanaan

dan penganggaran dalam mewujudkan pembangunan responsif gender dikuti

dengan rencana aksi daerah hal merupakan tahapan yang penting dalam

mewujudkan kesetaraan Gender.

Lebih lanjut Kepala Sub Bagian Umum Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Kutai Barat mengemukakan bahwa:

“Kerangka pikir yang responsif diperlukan dalam operasionalisasi program dan kegiatan pembangunan pada Kesbangpol khususnya dalam mengatasi adanya kesenjangan, akses partisipasi kontrol dan manfaat dalam melaksanakan kegiatan Kesbangpol antara perempuan dan laki-laki. Reduksi kesenjangan-kesenjangan untuk dilakukan guna memberi perhatian dan kesempatan berkembang bagi seluruh pelaku untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kesbangpol seperti Pengelolaan/ Pelaksanaan dan monitoring Evaluasi berbasiskan Gender misalnya: ruang laktasi, Day Care, smoking area”

(Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa

perencanaan responsif gender yang perlu diperhatikan adalah kerangka yang

responsif dalam operasionalisasi program yang dirancang oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik agar perhatian dan kesempatan pada gender dalam

diakomodasi untuk kepentingan semua pihak terutama pada level instansi.

2. Penetapan Rencana

Untuk mengetahui penetapan rencana dalam pembangunan responsif

gender maka selanjutnya hasil wawancara dengan informan pandangan Sekretaris

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat yang mengemukakan

bahwa:

“Pokja (Kelompok Kerja) pengarusutamaan gender Kabupaten Kutai Barat selalu mengadakan komunikasi dan koordinasi di bawah Pokja Darma Wanita Kabupaten Kutai Barat baik melakukan pelatihan kerja, seminar pemberdayaan perempuan, serta berkoordinasi dengan pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK) Kabupaten Kutai Barat di bawah koordinasi Ibu Bupati sebagai ketua Pokja (Kelompok Kerja) kabupaten dan Ibu Wakil Bupati Kutai Barat sebagai Wakil” (Hasil wawancara tanggal 5 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketehui bahwa penetapan rencana dibarengi dengan penetapan Pokja (Kelompok Kerja) dengan melakukan koordinasi dengan Ibu Bupati sebagai ketua Pokja (Kelompok Kerja) kabupaten dan Ibu Wakil Bupati Kutai Barat sebagai Wakil. Selanjutnya untuk mengetahui posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kutai Barat dalam penetapan rencana maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Sub Bagian Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat yang mengatakan bahwa: “Penetapan rencana pembangunan Responsif Gender keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kutai Barat tentu terlibat, karena di bawah Kesbangpol Kutai Barat terdapat organisasi kemasyarakatan sebagai binaan yaitu Forum Komunikasi Kaum Perempuan Kabupaten kutai barat yang tentunya dituangkan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) dari Kesbangpol kepada pemerintah Kutai Barat selain itu juga ada Darma Wanita unit Kesbangpol Kutai Barat yang semuanya itu

memperjuangkan kesetaraan gender”

(Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam penetapan rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat dilibatkan hal ini karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat Kutai Barat terdapat organisasi kemasyarakatan sebagai binaan yaitu Forum Komunikasi Kaum Perempuan Kabupaten Kutai Barat yang tentunya dituangkan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat kepada pemerintah Kutai Barat selain itu juga ada Darma Wanita unit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Barat yang semuanya itu memperjuangkan kesetaraan gender sehingga penetapan rencana betul-betul

**BAB V**

**PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

Secara keseluruhan perencanaan pembangunan responsif gender pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat telah dijalankan dengan baik hal ini ditandai pada aspek penyusunan rencana menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan yang responsif gender mengacu pada pedoman rencana pembangunan jangka panjang dan menengah secara nasional dan juga renstra Kabupaten. Penetapan Rencana menunjukkan bahwa penetapan rencana dibarengi dengan penetapan Pokja (Kelompok Kerja) dengan melakukan koordinasi dengan Ibu Bupati sebagai ketua Pokja (Kelompok Kerja) kabupaten dan Ibu Wakil Bupati Kutai Barat sebagai Wakil. Penetapan rencana dispesifikkan pada pemberian pelatihan terpadu kepada seluruh PNS dan TKK yang ada guna peningkatan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini merupakan bentuk kongkrit kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat dalam kaitan perencanaan responsif gender. Pada aspek pengendalian pelaksanaan rencana menunjukkan bahwa pengendalian dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dan koordinasi di bawah Kelompok Kerja Darma wanita Kabupaten Kutai Barat yang mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan kerja dan seminar pemberdayaan

perempuan. Pada aspek evaluasi pelaksanaan rencana menunjukkan salah satu upaya evaluasi dilakukan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat yaitu dengan membuat jadwal untuk pemakaian pakaian daerah hari kamis dan wajib hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan program PUG.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas, maka sebagai saran terkhusus kepada pemerintah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat yaitu:

1. Pokja (Kelompok Kerja) yang dibentuk disarankan untuk memberikan masukan teknis yang tidak terlalu normatif dalam mendorong pembangunan responsif gender.

2. Pengendalian responsif gender perlu dipublikasikan kepada masyarakat agar tidak hanya sekedar perencanaan namun juga dapat dikontrol secara bersama-sama baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Maulana Eko. (2013). Kepemimpinan Integratif dalam Konteks Good Governance. Jakarta: PT. Multicerdas Publishing.

Basuki, A. T., & Gayatri, U. (2009). Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 10(1), 34-50.

Dewi, Sinta R. (2006).”Pengarusutamaan Gender”. Jurnal Perempuan. Jakarta :

Yayasan Jurnal Perempuan.

Ginting, A., Supriyono, B., & Noor, I. (2016). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada Provinsi Bengkulu). WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora, 19(1).

Hermina, Dina. (2015). Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan. jurnal.iain-antasari.ac.id. diakses 23 November 2016.

Innes and Booher, J.E., D.E. (2000). Collaborative Dialogue as a Policy Making Strategy. Institute of Urban and Regional Development University of California, Berkeley.

Kuncoro, M. (2018). Perencanaan pembangunan daerah: teori dan aplikasi. PT Gramedia Pustaka Utama.

Kusumawati, A. (2007). Kepemimpinan dalam Perspektif Gender: Adakah Perbedaan?. PROFIT (JURNAL ADMINISTRASI BISNIS), 1(1).

Lalboe, N. (2006). Peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi kaitannya dengan ketahanan daerah: studi kasus di Pemerintahan kota Makassar. thesis, Pascasarjana-UI.

Lubis, Nur Ahmad Fadhil. (2003). Yurisprudensi Emansipatif. Bandung:

Citapustaka Media.

Mansour, Fakih. (1997). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Marince, Yesi. (2013). Pengarusutamaan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Politik dan Komunikasi Volume 1 Nomor 5.

Mosse, Julia Cleves. (2007). Gender dan Pembangunan Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir, Badrul. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. cetakan ke-2 2002. Bappeda Propinsi NTB, Mataram.

Nurcholis, H. (2005). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Jakarta : Grasindo.

Nursini. (2010). Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Teori dan Aplikasi . Diakses tanggal 20 Desember, 2019. Sumber: https://core.ac.uk/download/pdf/77629914.pdf

Peneliti The Indonesian Institute. 2012. Indonesia 2011. Jakarta : The Indonesian Institute.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Purnama, E. (2013). Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 1-26.

Pusat Kajian Wanita dan Gender. (2004). Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkann Keadilan Gender. Jakarta: Obor.

Putraningsih, Titik. (2006). Pertunjukan Tari: Sebuah Kajian Perspektif Gender.

journal.uny.ac.id. diakses tanggal 23 November 2016.

Ritzer, George and Douglas J. Goodman. (2003). Modern Sociological Theory, 6th Edition, diterjemahkan, Teori Sosiologi Modern, oleh Alimandan Jakarta: Prenada Media.

Susiana, Sali. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1.

Susilaningsih & Agus M. Najib, (2004). Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijogo dan McGill IISEP.

Tjokroamidjojo, B. (2003). Perencanaan Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Umar, Nasaruddin . (1999). Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an.

Jakarta: Paramadina.

Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4(2).